



Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Nagari Tanjung Beringin Selatan Kabupaten Pasaman

Lisa Ardianto^{1*}, Dewi Manda Angraini²

^{1,2}Universitas Islam Negeri M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

*Korespondensi penulis: lisaardianto321@gmail.com

Abstract. *This research aims to determine the effect of the Family Hope Program in improving the standard of living of beneficiary families (KPM). This research is motivated by the community in the South Tanjung Beringin subdistrict who are still unable to meet their daily needs. This has an impact on their children's education and the people in Kenagarian still do not feel fully prosperous. The research method is qualitative through a descriptive approach that describes something as it is, this research was carried out directly in the field to conduct direct interviews with the community receiving PKH assistance and PKH assistants.*

Keywords: *Program Keluarga Harapan, Standard Of Living, Public.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga Penerima manfaat (KPM). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat di kenagarian Tanjung Beringin Selatan yang masih belum mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Hal ini berimbas kepada pendidikan anak-anak mereka dan masyarakat di Kenagarian ini masih belum sepenuhnya merasakan sejahtera. Metode penelitian berupa kualitatif melalui pendekatan deskriptif yang menggambarkan sesuatu apa adanya, penelitian ini dilakukan secara langsung kelapangan untuk melakukan wawancara langsung dengan masyarakat penerima bantuan PKH dan pendamping PKH.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Taraf Hidup, Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan dapat dipandang sebagai permasalahan kemanusiaan yang mengancam kesejahteraan masyarakat karena merupakan permasalahan kemasyarakatan yang tersebar luas, memiliki banyak aspek, dan penuh tantangan. Permasalahan kemiskinan akan memberikan tantangan hidup bagi masyarakat Indonesia. Kualitas hidup dan perekonomian suatu negara akan terpuruk ketika terdapat individu-individu yang miskin. Diperlukan inisiatif pemerintah untuk menciptakan program yang menawarkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah berperan penting dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Kesejahteraan sosial adalah bidang atau lembaga yang berfokus pada upaya pemerintah atau organisasi swasta yang terorganisir dengan baik dan dilaksanakan secara profesional untuk menghindari, memitigasi, atau berkontribusi secara signifikan terhadap masyarakat di kota maupun perdesaan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang memiliki banyak aspek dan rumit. Kompleksitas permasalahan ini berdampak pada banyak aspek kehidupan dan tidak hanya berdampak pada kemiskinan. Islam memandang kemiskinan sebagai persoalan budaya di mana seseorang menjadi miskin akibat perilaku buruk, seperti terlalu malas bekerja atau berusaha, dan bukan sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan mendasar.

Allah SWT berpesan bekerja untuk menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan sendiri dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Hal ini diwujudkan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Qasas ayat 73, agar setiap individu dapat menjalani kehidupan yang terhormat, tumbuh sebagai individu, dan menjalankan peran sosial secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya.

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat padamalam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.

Kemiskinan yang terjadi di seluruh Indonesia terkait dengan kesejahteraan umum dan merupakan masalah penting yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan materiil, rohani, dan sosial warga negara agar mampu memenuhi tugas sosial dan kewarganegaraan serta hidup terhormat. Menurut Ratna Indria Sari, kemiskinan masih menjadi permasalahan penting bagi pemerintah bahkan masyarakat Indonesia, sehingga berarti masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep kesejahteraan sosial. Ketika seseorang atau suatu kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya—seperti sandang, pangan, papan, layanan kesehatan, dan pendidikan—mereka dikatakan berada dalam kondisi kemiskinan.

Pemerintah menggunakan bantuan sosial sebagai salah satu alat untuk membantu masyarakatnya keluar dari kemiskinan dan hidup sejahtera. PKH atau Program Keluarga Harapan merupakan salah satu bantuan sosial (Bansos) yang diciptakan. PKH merupakan program yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada Rumah Tangga Tidak Mampu (RTM) yang teridentifikasi sebagai keluarga penerima PKH (KPM).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan tunai bersyarat yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dengan berfokus pada keluarga sebagai langkah awal menuju terciptanya kesejahteraan dalam keluarga. Tingginya persentase masyarakat miskin dan pengangguran di Indonesia merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan negara ini. Pemerintah meluncurkan PKH atau bantuan bersyarat sebagai jaminan sosial untuk

akses kesehatan dan pendidikan, yang mencakup kesehatan balita dan ibu hamil serta pendidikan anak usia sekolah dasar, dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengembangkan kebijakan di bidang perlindungan sosial rumah tangga sangat miskin (RTSM). Pkh lebih mendukung inisiatif yang bertujuan menciptakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat kurang mampu. Masyarakat miskin merupakan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan dari pihak lain, dan kehadiran PKH di Indonesia diyakini akan memberikan manfaat bagi mereka. Program Keluarga Harapan (PKH) telah mampu membantu masyarakat penerima manfaat (KPM) program dengan permasalahan seperti biaya sekolah, kebutuhan ibu hamil dan anak, serta balita sehingga dapat membantu lansia, sehingga pandangan ekonomi syariah berlaku. bahwa peran program tersebut sejalan dengan ekonomi syariah.

Sejak dilaksanakan pada tahun 2007, program PKH—sebuah inisiatif perlindungan sosial yang juga dikenal sebagai Transfer Tunai Bersyarat (CCT) secara internasional—telah dilaksanakan. Sasaran PKH adalah rumah tangga berpendapatan rendah dan rentan yang termasuk dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Program ini mencakup komponen kesehatan, dengan persyaratan bagi anak di bawah enam tahun dan ibu hamil atau menyusui. Komponen pendidikan dengan persyaratan bagi anak yang termasuk dalam salah satu kategori berikut : Anak SD/MI atau sederajat, Anak SMA/MTs atau sederajat, Anak SMK/MA atau sederajat, dan Anak berusia enam sampai dua puluh satu tahun yang belum menyelesaikan dua belas tahun pendidikan wajibnya. Komponen kesejahteraan sosial baru telah diterapkan sejak tahun 2016 mempunyai kriteria bagi individu lanjut usia mulai dari umur 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas, dengan preferensi bagi penyandang disabilitas berat.

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan oleh direktorat Kementerian Sosial yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PKH, serta donor sosial daerah dari kabupaten dan kota yang membawahi bantuan sosial, perlindungan, dan jaminan sosial PKH di wilayahnya masing-masing.

Minimal Rp950.000 dan maksimal Rp3.700.000 diberikan kepada keluarga penerima PKH sebagai bantuan. Rincian pemberian bantuan tetap kepada peserta PKH adalah sebagai berikut: apabila dalam satu keluarga terdapat ibu hamil, anak nifas, balita, atau anak pra sekolah dikenakan tambahan Rp. 1.000.000 disediakan; apabila dalam keluarga termasuk anak usia sekolah dengan pendidikan setara SD/MI, tambahan Rp. 450.000 disediakan; jika dalam keluarga tersebut terdapat anak usia SMP dan SMA sederajat, maka bantuannya bertambah sebesar 1.000.000. Peserta PKH dapat membelanjakan manfaat bantuannya untuk modal

usaha, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan kebutuhan lain yang memajukan tujuan PKH.

Sebagai salah satu daerah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial Kabupaten Pasaman menyambut dan melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Untuk menjamin kelancaran program ini, Direktur Jaminan Sosial Keluarga menerbitkan Surat Keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2018 tentang Penunjukan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan. Tujuan dari keputusan ini adalah untuk menetapkan pendamping sosial yang akan dipekerjakan untuk mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai peserta program PKH di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pasaman. Sesuai dengan syarat dan ketentuan penerima manfaat PKH, pendamping sosial ini berupaya memberikan jaminan agar anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memperoleh hak dan menyelesaikan kewajibannya. Selain itu melakukan kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokaso bagi keluarga penerima manfaat (KPM) dalam mengakses layanan fasilitas Kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Kabupaten pasaman memiliki 12 kecamatan dengan 62 nagari dan memiliki luas wilayah mencapai 3.947,63 km². Di Pasaman Khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) telah ada sejak tahun 2015 yang dimana tingkat kemiskinan di Pasaman menurut Badan Pusat Statistik 2023 jumlah penduduk miskin di 2021 mencapai 21.57 ribu jiwa, pada tahun 2022 menurun hingga 19,94 ribu jiwa dan pada tahun 2023 19,99 ribu jiwa dengan persentase 2021 7,48 %, 2022 6,85 %, dan 2023 6,80 %. Dari jumlah penduduk per tahun 2021 sebanyak 299 851,00 jiwa, 2022 sebanyak 303 103,00 jiwa dan pada 2023 adalah sebanyak 307 425, 00 jiwa. Masyarakat Pasaman, khususnya di Nagari Tanjung Beringin Selatan, mendapatkan manfaat yang sangat besar dari Program PKH karena salah satu permasalahan utama di Nagari adalah kurangnya dana untuk kesehatan dan pendidikan. Selain itu, beberapa penerima program tidak memenuhi tujuan program, seperti beberapa rumah yang tergolong bagus atau mewah namun nyatanya tergolong terjangkau sehingga menyebabkan mereka menjadi penerima PKH. Kenyataannya, masih banyak orang yang kurang beruntung dan lebih membutuhkan pertolongan oknum-oknum tersebut hanya sekedar mendaftar sebagai jorong dan kader lainnya dan tidak mendapatkan atau termasuk dalam pendapatan KPM. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang perlu diperhatikan dalam memutuskan siapa yang berhak menerima bantuan PKH adalah hubungan antar kader yang mendaftar. Apabila terdapat ikatan kekerabatan antara individu yang terdaftar dengan pemohon, maka pemohon dapat diusulkan sebagai calon penerima bantuan PKH. Banyak tantangan yang muncul dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan akhir dari program ini adalah kesejahteraan masyarakat yang

merupakan dambaan setiap orang. Namun permasalahan kesejahteraan sosial yang muncul saat ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum sejahtera dan belum mampu menjalani kehidupan secara terhormat. Selama setahun terakhir, perekonomian Nagari Tanjung Beringin Selatan terpuruk. Hal ini disebabkan cuaca di wilayah tersebut yang tidak menentu sehingga menyebabkan tingginya tingkat kegagalan panen di kalangan petani dan menurunkan pendapatan masyarakat. Masyarakat di kenagarian Tajung Beringin Selatan bermayoritas sebagai petani sehingga Tingkat pendidikan masyarakat di kenagarian ini relative rendah karena minimnya pendapatan dan sulitnya perekonomian. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari mereka juga bekerja sebagai butuh tani dengan penghasilan yang minim bahkan tidak cukup untuk menutupi kebutuhan bagi mereka yang memiliki anggota keluarga yang terbilang lebih dari 5 orang. Hanya Sebagian kecil dari masyarakat yang baru merintis usaha kecil seperti memproduksi makanan ataupun membuka usaha bengkel demi memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari . Karena minimnya pendapatan masyarakat di kenagarian ini maka Tingkat pendidikan masih rendah. Hanya Sebagian kecil dari masyarakat yang baru merintis usaha kecil seperti memproduksi makanan ataupun membuka usaha bengkel demi memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Tabel 1. Data Jumlah Penerima PKH Nagari Tanjung Beringin Selatan

No	Tahun Penerima PKH	Jumlah Penerima PKH
1	2021	81 orang
2	2022	76 orang
3	2023	103 orang

Sumber data: Korkap PKH

Berdasarkan tabel 1 data jumlah penerima PKH di Nagari Tanjung Beringin Selatan pada tahun 2021 berjumlah 81 orang, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 76 orang, lalu ditahun 2023 jumlah penerima PKH bertambah menjadi 103 orang. Perbandingan dari tahun ke tahun yaitu kemiskinan pada tahun 2021 ke 2022 menurun yang berarti program keluarga harapan mampu dalam mengatasi kemiskinan. Akan tetapi pada tahun 2023 jumlah penerima PKH semakin meningkat. Hal ini dapat dikatakan bahwasanya jika kemiskinan meningkat maka bantuan juga akan meningkat, sebaliknya apabila kemiskinan menurun maka bantuan-bantuan juga akan berkurang dan hal ini bisa dikatakan tingkat kesejahteraan masyarakat sudah meningkat. Jumlah bantuan Program Keluarga Harapan biasanya berdasarkan dengan jumlah yang ditanggung dalam keluarga.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Program Keluarga Harapan

Program pemerintahan Indonesia untuk masyarakat miskin disebut Program Keluarga Harapan. Meskipun program ini bukan merupakan salinan dari gagasan Islam semata, Islam dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Program Keluarga Harapan merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan program bantuan tunai bersyarat bagi masyarakat miskin guna memutus siklus kemiskinan, menjaga kesejahteraan komunal, dan mengentaskan kemiskinan.

Indikator Program Keluarga Harapan

Dengan tujuan menurunkan kemiskinan, Program Keluarga Harapan menawarkan bantuan bersyarat kepada rumah tangga yang memenuhi syarat. Menurut Afrizal, ada empat cara untuk menilai efektivitas Program Keluarga Harapan: bantuan sosial, bantuan PKH, layanan kesehatan dan pendidikan, pendaftaran, dan bantuan pelengkap/komplementer.

Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan jangka panjang PKH untuk memutus siklus kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengubah perilaku rumah tangga miskin, sedangkan tujuan jangka pendek Program Keluarga Harapan merupakan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung). . (RTM), yang juga dikenal sebagai keluarga penerima manfaat (KPM), cenderung kurang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Kriteria Penerima Manfaat PKH

Penerimanya dapat dibedakan berdasarkan komponennya, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Setiap elemen memiliki persyaratan dengan:

1. Komponen kesehatan yaitu ibu hamil/nifas/menyusui
2. Anak usia dini dengan rentang umur 0-6 tahun
3. Komponen pendidikan yakni anak-anak dengan usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar.
4. Komponen kesejahteraan sosial yakni : seseorang yang sudah lanjut usia, penyandang disabilitas berat.

Pengertian Taraf Hidup

Tingkatan adalah suatu tingkatan, mutu (dalam artian tinggi rendahnya, dsb), sedangkan kehidupan itu masih ada, bergerak dan berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut KBBI, tanda pengenal adalah sesuatu yang dapat memberi petunjuk atau data. Cara hidup umumnya dapat diperkirakan melalui norma gaji (misalnya disesuaikan dengan ekspansi); Langkah-langkah lain seperti aksesibilitas dan sifat layanan medis, inkonsistensi pertumbuhan gaji, dan kepuasan pendidikan juga digunakan.

Faktor-Faktor Mempengaruhi Taraf Hidup

Pergerakan keuangan, efisiensi, gaji dan gaya hidup saling terkait. Peningkatan gaji berarti peningkatan cara hidup. Terciptanya dan tidak adanya tatanan sosial dapat dikenali dari dua variabel, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Dilihat dari elemen interiornya, ia mencakup empat hal, yaitu:

1. Jumlah anggota keluarga
2. Tempat tinggal
3. Keadaan sosial keluarga
4. Keadaan ekonomi keluarga

Indikator Taraf Hidup

Kepuasan pribadi atau yang sering dibedakan sebagai tanda bantuan pemerintah seseorang meliputi 6 kumpulan petunjuk, yaitu :

1. Kependudukan
Penghuni adalah orang perseorangan yang telah berdomisili di wilayah geologi Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih atau berpotensi adalah orang yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan namun maksudnya tetap.
2. Kesehatan
Status kesejahteraan secara umum dapat digambarkan berdasarkan banyaknya keluhan masyarakat terkait masalah kesehatan. Banyaknya keluhan kesehatan ditunjukkan oleh banyaknya orang yang menghadapi keberatan kesehatan pada waktu tertentu dan protes tersebut mempengaruhi aktivitas dan kinerja masyarakat.
3. Pendidikan
 - 1) Dapat membaca dan menulis
 - 2) Seseorang dikatakan bersekolah apabila ia terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal

- 3) Penduduk usia sekolah, yakni usia SD 7-12 tahun, SMP 13-15 tahun dan SMA 16-18 tahun
 - 4) Status sekolah, seperti tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, tidak bersekolah dan tamat
4. Ketenagakerjaan
- 1) Angkatan kerja, khususnya kelompok usia kerja yang bekerja pada minggu sebelumnya, atau mempunyai pekerjaan namun sebentar tidak bekerja, seperti menunggu pengumpulan, perwakilan yang sedang cuti, dan lain-lain.
 - 2) Bukan angkatan kerja, specifically populace bunches who during the previous week had exercises that were excluded from the labor force, for example, going to class, dealing with the family and the individuals who couldn't do exercises like the old, actually incapacitated, and pay/benefits beneficiaries who were done working
 - 3) Perumahan
 - a. Luas lain yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari
 - b. Dinding
 - c. Atap, sehingga orang yang mendiami dibawahnya terlindungi dari terik matahari dan hujan
 - d. Sumber air minum
 - 4) Konsumsi

Segala pengeluaran yang dikeluarkan oleh keluarga secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pemanfaatan keluarga. Pemanfaatan keluarga dipecah menjadi 2 kelompok konsumsi, tepatnya :

 - a. Pengeluaran konsumsi makanan
 - b. Pengeluaran bukan konsumsi makanan

Upaya Dalam Meningkatkan Taraf Hidup

Ada kemajuan berbeda yang membantu mencapai peningkatan harapan akan kenyamanan sehari-hari. Cara-cara tersebut adalah dengan menggarap hakikat sumber daya manusia (HR), memberikan kesempatan untuk membuka berbagai jenis organisasi, khususnya perusahaan swasta, memberikan peluang seluas-luasnya bagi spekulasi untuk tujuan yang bermanfaat, dan meningkatkan peningkatan di setiap bidang keuangan.

3. METODE PENELITIAN

Dari pembahasan di atas, berdasarkan permasalahan yang dialami dalam penelitian ini dinyatakan sebagai penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif yang bertujuan menggambarkan sesuatu apa adanya. Strategi dalam melakukan penelitian yang berfokus pada peristiwa atau gejala alam disebut penelitian kualitatif. Bersifat dasar dan naturalistik, penelitian kualitatif hanya dapat dilakukan di lapangan dan bukan di laboratorium.

Sumber Data

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh atau didapat dari sumber objeknya yaitu melalui wawancara. Wawancara ini dilakukan terhadap masyarakat penerima PKH dan masyarakat yang tidak menerima PKH.
2. Data Sekunder merupakan data yang penulis dapatkan dari bahan-bahan perpustakaan dan berfungsi untuk tahapan pelengkap data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Yaitu melalui pertama, pengamatan (Observasi) secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi ini penulis lakukan untuk melihat dan mengetahui apakah dengan adanya program keluarga harapan ini dapat meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat (KPM) di Nagari Tanjung Beringin Selatan. Kedua, melalui wawancara (Interview) penulis melakukan wawancara terbuka dan wawancara tak terstruktur, artinya orang yang penulis wawancara menyadari dan mengetahui tujuan dari wawancara tersebut. Terakhir, melalui dokumentasi, penulis menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Nagari Tanjung Beringin Selatan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dikatakan Ibu Mike Arma Yenita, di Dinas Sosial Kabupaten Pasaman mengatakan proses perekrutan penerima dana PKH ini adalah dengan melihat data yang terdaftar di data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang telah di daftarkan oleh perangkat desa yang sebelumnya perangkat desa akan melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan masyarakat yang berhak dan layak untuk menerima bantuan ini, lalu pihak desa akan menyerahkan hasil verifikasi tersebut kepada dinas sosial yang nantinya akan di laporkan kepada bupati dan diteruskan kepada menteri sosial dan jika memenuhi persyaratan maka akan

disahkan oleh menteri sosial. Setelah itu, jika data dari pusat sudah keluar dan validasi siapa yang masuk dalam kategori penerima PKH maka pendamping akan melakukan sosialisasi awal ke masyarakat tentang apa itu PKH, lalu langkah kedua yaitu pemuktahiran data disini dilakukan perubahan data dari jenjang SD ke SMP atau SMP ke SMA dan sebagainya. Langkah ke tiga yaitu melakukan kunjungan kerumah masyarakat penerima PKH dengan melihat bagaimana kondisinya dan dari situ bisa diambil keputusan untuk menjadikan masyarakat tersebut sebagai KPM. Setelah diputuskan. Selanjutnya akan dibagi kelompok lalu melakukan pertemuan per kelompok. Lalu melakukan koordinasi dengan Walinagari dan pak camat dan stakeholder seperti puskesmas dan lainnya. Selanjutnya berkoordinasi dengan Bank yang akan melakukan pencairan dana PKH. Setelah itu pendamping akan menghitung uang siapa yang sudah cair dan dilakukan program bimtek jika ada program baru. Selain itu, pendamping PKH memastikan penerima bantuan mendapatkan bantuan tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai dengan tanggungan. Pendamping pkh juga mempunyai peran andil dalam mengatasi dan menyelesaikan keluhan serta permasalahan yang dialami oleh penerima manfaat.

Salah satu program bantuan sosial Indonesia untuk perlindungan disebut PKH. Keluarga yang berpenghasilan rendah dan rentan berhak menerima bantuan ini, asalkan memenuhi standar tertentu dan terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Salah satu inisiatif pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan lebih cepat adalah PKH yang fokus pada pemutusan siklus kemiskinan generasi. Berangkat dari teori di atas, maka penerapan PKH di Nagari Tanjung Beringin Selatan telah sesuai dengan pedoman dan protokol yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dalam pelaksanaan PKH. dimana dinas sosial dan fasilitator PKH bekerja sama secara efektif untuk memastikan distribusi hibah masyarakat ditangani dengan lancar.

Kesejahteraan Masyarakat Penerima Program Keluarga Harapan(PKH) di Nagari Tanjung Beringin Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan peserta PKH di Nagari Tanjung Beringin Selatan, program tersebut tampaknya berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah dilaksanakan. Komponen yang ditetapkan PKH menunjukkan kesejahteraan tersebut. Misalnya, komponen pendidikan dapat membantu masyarakat penerima PKH dalam memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan mereka, termasuk pembelian perlengkapan sekolah dan buku atau perlengkapan untuk ibu hamil dan anak kecil.. Selain itu, komponen kesehatan dapat membantu ibu hamil dan balita memenuhi kebutuhannya, seperti membelikan susu untuk bayi dan perlengkapan ibu hamil, dan komponen kesejahteraan sosial dapat membantu lansia yang tidak mampu lagi menghidupi dirinya sendiri. Meski begitu,

beberapa penerima manfaat PKH terus menyatakan bahwa karena mereka baru menerima bantuan, mereka masih merasa tidak enak badan.

Menurut Elfindri, kemakmuran dapat diartikan sebagai terpuaskannya kebutuhan seseorang, Seseorang dianggap sejahtera jika mereka puas dan merasa bahwa mereka memiliki semua yang mereka butuhkan, jika kedamaian batin mereka terpelihara, dan jika mereka merasakan keadilan dalam hidup mereka sebagai hasil dari pelepasan mereka dari cengkeraman kemiskinan dan pencegahan yang akan datang. bahaya.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka bisa diambil kesimpulan mengenai Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Tanjung Beringin Selatan mencakup hal yaitu:

- 1) Program Keluarga Harapan telah berhasil dilaksanakan di Nagari Tanjung Beringin Selatan. Telah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, seperti alur pelaksanaan PKH yang dimulai dengan peninjauan data yang dimasukkan ke dalam DTKS, validasi dan pemutakhiran data, mendatangi rumah warga untuk verifikasi, mengadakan pertemuan kelompok, berkoordinasi dengan walnag, camat, pemangku kepentingan, dan bank pencairan dana, serta memberikan laporan bulanan untuk memastikan kelancaran operasional program.
- 2) Karena besarnya bantuan yang diberikan oleh PKH, maka masyarakat penerima KPM dan PKH dapat dianggap sejahtera dari segi pendidikan, mempunyai kemampuan finansial untuk menyekolahkan anaknya hingga SMA, dan dari segi kesehatan. memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan anak kecil dan ibu hamil.
- 3) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasakan adanya peningkatan terhadap taraf hidup mereka melalui Program bantuan bersyarat (PKH). Meningkatnya kualitas hidup mereka yang diukur dari segi pendapatan.

Keterbatasan

Perlu diperhatikan bahwa di Nagari Tanjung Beringin Selatan tidak banyak masyarakatnya dinyatakan sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat), untuk itu penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu dari segi waktu kurang lebih dari 2 minggu dan dari segi biaya untuk penelitian ini. Penelitian juga hanya dilakukan di dua jorong saja. Penulis berharap Program Keluarga Harapan (PKH) dapat terlaksana dengan sukses dan bantuan pemerintah

kepada masyarakat dapat disalurkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Data pengguna bantuan terus dimutakhirkan oleh Dinas Sosial, Kecamatan, Kenagarian, dan asosiasi.

Saran

Masyarakat penerima manfaat PKH diharapkan dapat memanfaatkan bantuan pemerintah secara maksimal dan selalu diharapkan untuk menghadiri pertemuan kelompok. Selain itu, pendamping PKH juga harus memberikan edukasi kepada penerima manfaat PKH agar tidak membutuhkan bantuan pemerintah. Agar program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran, pemerintah diperkirakan akan menggunakan data yang lebih andal ketika mengidentifikasi rumah tangga penerima. Selain itu, diharapkan para akademisi di masa depan dapat melakukan penelitian yang lebih menyeluruh mengenai bantuan Program Keluarga Harapan untuk menentukan apakah bantuan tersebut dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baiq, R. T., Burhan, B., & Dkk. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi angka kemiskinan. *Jurnal Ilmu Administrasi Public*, 7(2), September.
- BPS Sumatera Barat.
- BPS.go.id.
- Bugin, B. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Dahlia Sukmasari. (2020). Konsep kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Quran. *Jurnal of Qur'an and Hadis Studies*, 3(1), Juni.
- Elfindri. (2021). *Kesejahteraan sosial*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, M. I. (2020). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasi*. Ghalia Indonesia.
- Indra, D., & Dkk. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Lexy J. Maleong. (1944). *Metode penelitian kualitatif (Cekte 5)*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Listy, J., & Dkk. (2024). Dampak PKH terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga di Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, 6(1).
- Mayuni, G. I. P., & Dkk. (2024). Efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa

Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1).

Mohamad, I. R. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kesejahteraan masyarakat Kab. Lebak, Banten. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 4(01), Maret.

Nopelly, A., & Dkk. (2023). Analisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Pekanbaru. *Jurnal Economic and Business Management International*, 5(2).

Nur, P. D. (2022). Program Keluarga Harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Bubeaya. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 15(1).

Nurma, M. H., & Dkk. (2019). Analisis dampak pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2).

Nurul, I. F., & Dkk. (2020). Analisis pengaruh Program Keluarga Harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. *Jurnal Najaha Iqtishod*, 1(1), September-Desember.

Pasal 30-32, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Pasal 49, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Puryanto. (2021). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Gunung Talang Kab. Solo. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*.

Riza, P., & Dkk. (2023). Peranan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan rumah tangga menurut ekonomi syariah. *Jurnal of Sharia and Law*, 2(4).

Rohana, W. L., & Dkk. (2020). Analisis pengaruh bantuan sosial PKH terhadap kesejahteraan masyarakat di Kec. Panggunrejo Kab. Blitar. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), Desember.

Sandi, A., & Dkk. (2021). Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam. *Jurnal of Shariah and Islam Economics*, 2(1), April.

Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif* (Cet. 9). Bandung: Alfabeta.

Suharmi, A. (2009). *Prosedur penelitian pendekatan praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.

Sumbar.prov.go.id.

Virna, M., & Dkk. (2020). Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat di Kec. Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Public*, 2(1).

Yuliana, Q. A., & Dkk. (2021). Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(2).

Zuchri, A. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (Cet. 1). Makassar: Syakir Media Press.